

Teori *ACTORS* dalam Pemberdayaan Masyarakat

Oleh: Karjuni Dt. Maani

ABSTRACT

By using the concept of empowerment that are offered within the framework of the theory of "ACTORS", then the changes that will result is a change has been planned, because the input to be used in the change was anticipated early on so that the output will be produced capable of optimally efficient. The study of the management of community development using the framework of "ACTORS" will be able to raise awareness, authority, confidence and competence, trust, oppurtunities, responsibilities, support, initiative, and creativity to change the situation towards the power in which communities have self-respect, self confident, and self reliance, so they have the knowledge and understanding for self-empowerment on an ongoing basis.

Kata Kunci: *empowerment, authority, confidence and competence, trust, oppurtunities, responsibilities, support*

I. PENDAHULUAN

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) muncul dengan dua premis mayor, kegagalan dan harapan¹. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan, adanya alternatif-alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi, dan partum-buhan ekonomi secara memadai. Kegagalan dan harapan ini bukan merupakan alat ukur ilmu-ilmu

sosial, melainkan cerminan nilai-nilai normatif dan moral yang terasa sangat nyata di tingkat individu dan masyarakat².

Dalam konteks ini Armatya Sen menekankan, pembangunan ekonomi harus diterjemahkan sebagai proses meningkatkan derajat kebebasan manusia dalam menentukan pilihan-pilihan sendiri. Pendapatnya didasarkan pada pengamatan bahwa masalah utama negara berkembang lebih pada berkurangnya makna kehidupan (*reduced lives*) daripada rendahnya pendapatan. Karena itu strategi yang tepat untuk mengatasi

¹ Friedmann, John. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Massachusetts: MT Press.

² Sen, Amartya. 1984. *Resource, Values, and Development*. New York: Wiley.

hal ini adalah meningkatkan “kebebasan” dan “kemampuan” umat manusia dalam memilih nilai sesuai yang diyakini.

Sejalan dengan pemikiran Sen, Kartasasmita³ menjelaskan, kemajuan ekonomi secara berkesinambungan harus didukung sumber daya manusia yang memiliki prakarsa dan daya kreasi. Prakarsa hanya tumbuh apabila terdapat emansipasi serta kesempatan yang penuh untuk berpartisipasi dalam proses perubahan. Karena itu, diperlukan kebebasan dan kesempatan untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut individu dan masyarakat. Dalam keadaan tiadanya kebebasan dan kesempatan, prakarsa dan daya kreasi menjadi terbatas.

Pemberdayaan sebagai konsep alternatif pembangunan, dengan demikian menekankan otonomi pengambilan keputusan suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, partisipasi, demokrasi, dan pemberdayaan sosial melalui pengalaman langsung. Fokusnya adalah lokalitas, karena masyarakat lebih siap diberdayakan lewat isu-isu lokal. Meski demikian Friedmann⁴ mengingatkan, sangat tidak realistis apabila kekuatan ekonomi dan struktur-struktur di luar masyarakat diabaikan. Karena itu, pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas ekonomi, tapi juga politik, sehingga masyarakat memiliki daya posisi tawar (*bargaining position*) secara nasional maupun internasional.

³ Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Kemiskinan*. Jakarta: Balai Pustaka.

⁴ Friedmann, John. 1992. *Op cit*.

Konsep pemberdayaan merupakan hasil interaksi di tingkat ideologis maupun praktis. Di tingkat ideologis, konsep ini merupakan hasil interaksi antara konsep *top-down* dan *bottom-up*, antara *growth strategy* dan *people centered strategy*. Sedangkan di tingkat praksis, interaksi terjadi lewat pertarungan antar otonomi. Konsep pemberdayaan, dengan demikian, mengandung konteks pemihakan kepada masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

Memperhatikan uraian tentang *mainstream* teori-teori pembangunan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekonomi rakyat, di mana manusia (individu dan masyarakat) harus menjadi subyek pembangunan. Uji empiris menunjukkan, teori-teori yang berpihak pada peran masyarakat luaslah yang lebih berhasil dalam pembangunan di negara-negara berkembang. Teori yang semata-mata mengandalkan modal dan sumber daya alam telah usang. Sebaliknya, teori yang berorientasi pada manusia makin unggul dan cenderung berkembang, salah satunya adalah teori ACTORS.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat di Indonesia, ada tiga hal yang perlu dilakukan melalui teori ACTORS. *Pertama*, pembangunan perlu diarahkan pada perubahan struktur. *Kedua*, pembangunan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat guna menuntaskan masalah kesenjangan berupa pengangguran, kemiskinan, dan ketidakmerataan dengan memberikan ruang dan kesempatan lebih besar kepada rakyat banyak untuk berpartisipasi dalam pembangunan. *Ketiga*, pembangunan perlu diarahkan pada koordinasi

lintas-sektor yang mencakup program pembangunan antarsektor, antardaerah, dan pembangunan khusus. Dalam pelaksanaan, ketiga arah itu harus dilakukan secara terpadu, terarah, dan sistematis tidak dapat saling dipisahkan. Pada akhirnya pemberian ruang dan kesempatan yang lebih besar kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dapat bersinergi dengan upaya menanggulangi pengangguran, kemiskinan, dan ketidakmerataan.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sisi: *Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang; *Kedua*, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah; *Ketiga*, melindungi atau memihak yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan saling menguntungkan. Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat sebagai strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keyakinan ini perlu diperkuat dan dimasyarakatkan lewat usaha-usaha nyata.

II. STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sebenarnya berbagai konsep dan program pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan telah banyak dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Diantaranya program-program yang ditujukan untuk

menanggulangi kemiskinan dijabarkan melalui program pembangunan sektoral, pembangunan regional, dan pembangunan khusus⁵. Program-program yang dilakukan tersebut sifatnya *top-down*, sangat sentralistik, dan tidak banyak melibatkan potensi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif. Peran birokrasi dan intervensi pemerintah sangat dominan dalam pelaksanaannya sehingga memberikan dampak negatif untuk kepentingan jangka pendek. Adanya realita negatif yang berkembang di masyarakat, telah mendorong pemerintah untuk melakukan reorientasi pembangunan serta “revitalisasi” atas konsep pembangunan.

Dari berbagai rekomendasi yang ditawarkan yang banyak dikemukakan adalah perlunya menciptakan kebijakan makro yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, penyesuaian kebijakan sektoral, menciptakan efisiensi dan kepekaan terhadap pasar serta mengurangi rigiditas birokrasi dan intervensi pemerintah dalam interaksi ekonomi⁶. Selain itu, diperulakan perubahan filosofi dari pola sentralisasi menjadi desentralisasi, pola pembangunan dengan konsep *top-down planning* menjadi *bottom-up planning*, *uniformity* menjadi variasi lokal, sistem komando menjadi proses pembe-

⁵ Sumodiningrat, Gunawan. 1996. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara.

⁶ Safi'i .2011. *Ampih Miskin: Model Kebijakan Penuntasan Kemiskinan dalam Perspektif Teori dan Praktek*. Malang: Averroes Press.

lajaran, ketergantungan menjadi keberlanjutan, *social exclusion* menjadi *social inclusion*, dan *improvement* menjadi *transformation*⁷

Pelaksanaan konsep ini memerlukan reorientasi pembangunan, gerakan sosial, institusi lokal, dan pengembangan kapasitas. Hal ini didedikasikan kepada masyarakat untuk lebih mendapatkan kesempatan ikut serta dalam proses pembangunan adalah setiap warga masyarakat harus “mampu” dan “berdaya”. Karena pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang dimilikinya⁸. Secara nyata pemberdayaan masyarakat dapat diupayakan melalui pembangunan ekonomi kerakyatan. Sementara itu pembangunan ekonomi kerakyatan harus diawali dengan usaha pengantasan kemiskinan yang masih menjadi permasalahan bagi sebagian kelompok masyarakat.

Kemiskinan masyarakat merupakan salah satu masalah yang perlu segera mendapatkan penanganan dengan baik. Dengan kecenderungan seperti itu, isu-isu pemberdayaan masyarakat masih tetap penting dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan masyarakat. Walaupun upaya pemberdayaan masyarakat tidak mudah dilakukan untuk mencapai hasil yang optimal, namun atmosfer otonomi daerah dan keterbukaan politik akan memberikan

harapan terhadap upaya meningkatkan kapasitas keberdayaan masyarakat tersebut.

Konsep *empowerment* (pemberdayaan), apabila dikaji lebih dalam maka terdapat dua muatan dasar yang terdiri dari asas positivisme dan asas interaktif⁹. Asas positivisme lebih mengarah pada analisis kuantitatif seperti berikut: *Pertama, growth strategy*, di mana dalam pelaksanaan pembangunan lebih diarahkan pada strategi pembangunan dengan penghitungan *Gross National Product* (GNP) dalam menilai keberhasilan pembangunan di suatu negara. *Kedua, employment program*, yang lebih banyak melihat pada analisis tenaga kerja. *Ketiga, basic need strategy*, yang lebih mengarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat.

Sedangkan kajian pada asas interaktif, lebih mengarahkan pada pandangan pembangunan dengan analisis kualitatif seperti berikut: *Pertama, empowerment*, yang melihat pada bagaimana menumbuhkan keberdayaan masyarakat dalam memperbaiki kualitas hidup mereka. *Kedua, sustainability*, yang melihat pada keberlanjutan pembangunan dengan memikirkan kelestarian alam dengan lingkungannya untuk dapat diwariskan pada generasi berikutnya. *Ketiga, approach technology*, yang diarahkan pada pembangunan dengan menggunakan kesempatan untuk menggunakan teknologi dalam pembangunan.

⁷ Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁸ Kusnadi. 2006. *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bandung: Humaniora.

⁹ Riyadi, Suprpto. 2001. *Strategy Empowerment*. Malang: FIA Unibraw.

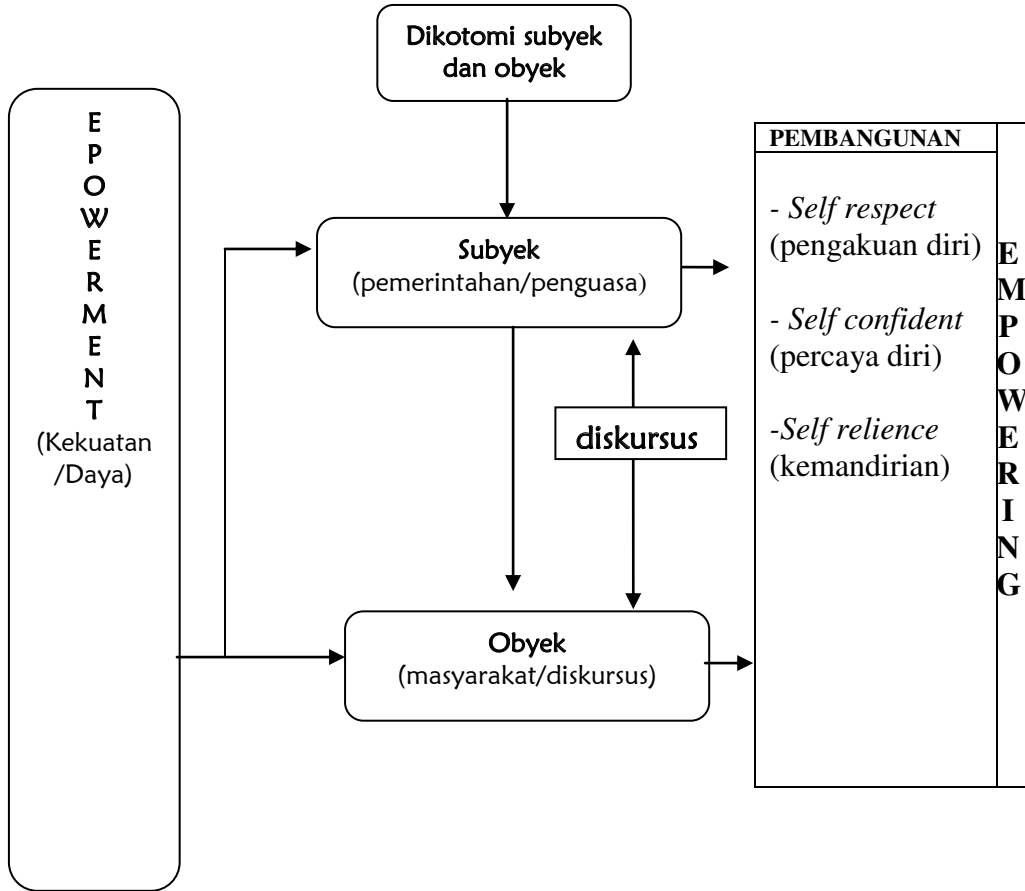
Menurut Hulme dan Turner¹⁰ pemberdayaan dapat dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) strategi antara lain: *Pertama, the welfare approach*, pendekatan ini mengarah pada pendekatan manusia dan bukan untuk memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dan kemiskinan rakyat tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakat dalam pendekatan *sentrum of power*, yang dilatarbelakangi oleh kekuatan potensi lokal masyarakat itu sendiri. *Kedua, the development approach*, pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan proyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keswadayaan masyarakat. *Ketiga, the empowerment approach*, pendekatan yang melihat bahwa kemiskinan sebagai akibat dari proses politik, dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaan mereka.

Sementara itu Hulme dan Turne menegaskan, keberdayaan masyarakat sangat dibatasi oleh dikotomi subyek dan obyek. Dikotomi subyek dan obyek terjadi karena *power* (daya/kekuatan) yang mempengaruhi subyek dan obyek melalui kedekatan dengan *sentrum power*, sehingga kemampuan, status, kepemilikan, kedudukan dari masyarakat akan sangat bergantung pada *power* tersebut, semakin dekat masyarakat dengan *sentrum of power*, maka daya/kekuatan yang dimiliki oleh

masyarakat juga akan semakin banyak. Pendapat ini dapat dilihat pemetaannya sebagai berikut:

¹⁰Hulme, David & Turner M. 1990. *Sociology of Development, Theories, Policies and Practices*. Hartfordshire: Harvester Wheatsheaf.

Dikotomi Subyek dan Obyek



Dari gambar di atas, menurut Hulme dan Turne perlu adanya diskursus antara pemerintah dengan masyarakat untuk menentukan subyek dan obyek dalam pembangunan. Hal ini harus dilakukan karena pada negara-negara sedang berkembang ternyata pembangunan banyak didominasi oleh pemerintah sebagai kekuatan yang lebih dekat dengan sentrum kekuasaan. Bersumber pada hal tersebut, maka masyarakat sebagai kelompok yang jauh dari sentrum kekuasaan akhirnya hanya berperan sebagai obyek pembangunan yang lebih banyak dikorbankan demi pembangunan. Hal ini lah yang menyebabkan masyarakat menyadi tidak berdaya karena mereka tidak memiliki *self respect* (pengakuan diri), *self confident* (percaya diri), *self reliance* (kemandirian). Sehingga dengan demikian, masyarakat menjadi tetap miskin dan tidak berdaya.

III. TEORI “ACTORS” DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Teori “ACTORS” tentang pemberdayaan yang dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay¹¹ lebih memandang masyarakat sebagai subyek yang dapat melakukan perubahan dengan cara membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-ide, keputusan-keputusannya, dan tindakan-tindakannya. Pemberdayaan

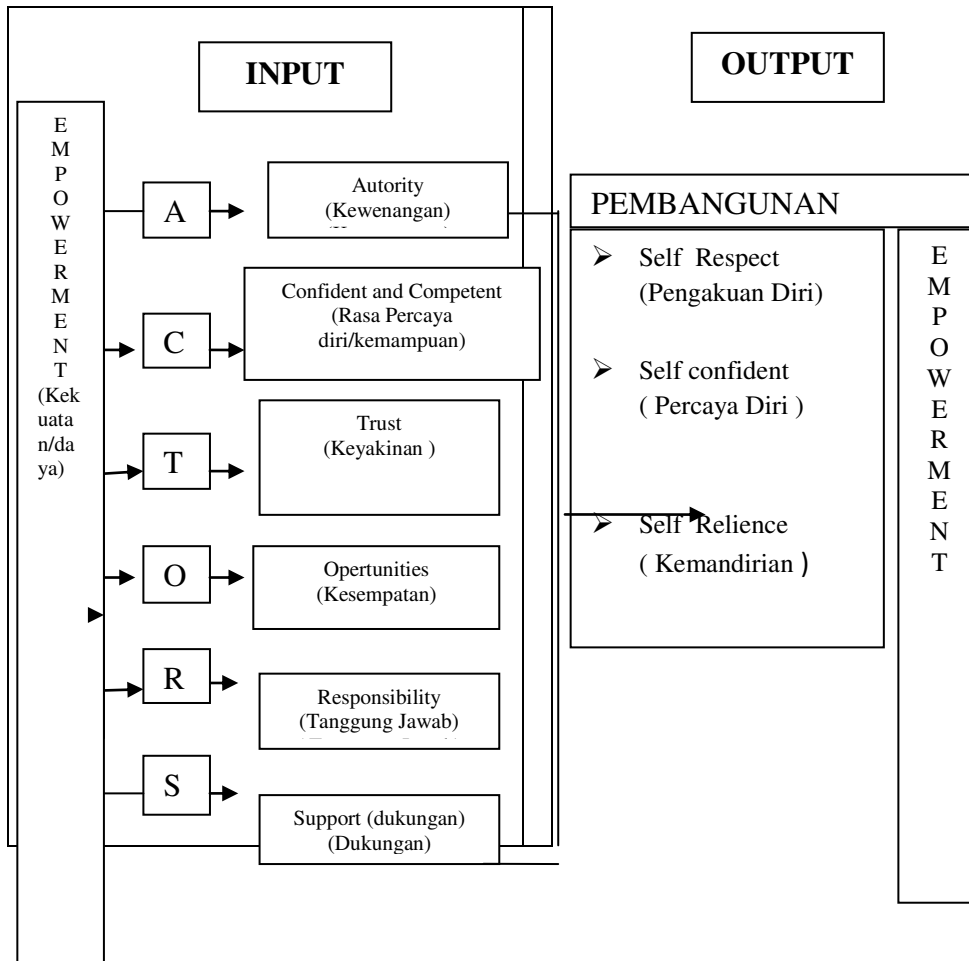
yang dimaksudkan oleh Cook dan Macaulay lebih mengarah pada pendelegasian secara sosial dan etika/moral, antara lain: (a) mendorong adanya ketabahan; (b) mendelegasikan wewenang sosial; (c) mengatur kinerja; (d) mengembangkan organisasi (baik lokal maupun eksteren); (e) menawarkan kerjasama; (f) berkomunikasi secara efisien; (g) mendorong adanya inovasi; dan (h) menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Kerangka kerja pemberdayaan dapat dilihat dari akronim “ACTORS” antara lain terdiri dari:

- A**= authority (wewenang) dengan memberikan kepercayaan
- C**= confidence and competence (rasa percaya diri dan kemampuan)
- T**= trust (keyakinan)
- O**= oppurtinities (kesempatan)
- R**= responsibilities (tanggung jawab)
- S** = support (dukungan)

Gambarannya lebih jelas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

¹¹Sarah Cook & Steve Macaulay. 1997. *Perfect Empewermant*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Gambar 1
Kerangka Kerja Teori ACTORS



Dengan menggunakan konsep pemberdayaan yang ditawarkan Cook dan Macaulay ini, maka perubahan yang akan dihasilkan merupakan suatu perubahan yang bersifat terencana karena input yang akan digunakan dalam perubahan telah diantisipasi sejak dini sehingga output yang akan dihasilkan mampu berdayaguna secara optimum. Kajian pengelolaan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan kerangka kerja “ACTORS” adalah sebagai berikut:

- (a) *authority*, kelompok/masyarakat diberikan kewenangan untuk merubah pendirian atau semangat (etos kerja) menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu milik mereka sendiri. Dengan demikian mereka merasa perubahan yang dilakukan adalah hasil produk dari keinginan mereka untuk menuju perubahan yang lebih baik;
- (b) *confidence and competence*, menimbulkan rasa percaya diri dengan melihat kemampuan mereka untuk dapat merubah keadaan;

- (c) *trust*, menimbulkan keyakinan bahwa mereka mempunyai potensi untuk merubah dan mereka harus bisa (mampu) untuk merubahnya;
- (d) *opportunities*, memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memilih apa yang menjadi keinginannya sehingga mereka dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang ada dalam diri masyarakat itu sendiri;
- (e) *responsibilities*, dalam melakukan perubahan harus melalui pengelolaan sehingga dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk berubah menjadi lebih baik; dan
- (d) *support*, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk menjadikan lebih baik. Dalam hal ini dukungan yang diharapkan selain dari sisi ekonomis, sosial dan budaya juga dukungan dari berbagai *stakeholders* (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) yang dilakukan secara simultan tanpa didominasi oleh salah satu pihak/faktor.

Dengan menggunakan kerangka kerja ACTORS tersebut, guna menumbuhkan keberdayaan masyarakat, akan dapat dilakukan dengan mengacu pada pemberdayaan yang berasal dari inner dan inter masyarakat. Di mana pemerintah dan organisasi non pemerintah sebagai aktornya.

Di negara-negara berkembang peranan pemerintah sangatlah penting karena pemerintah berperan: (1) menggali, menggerakkan, dan mengombinasikan faktor sumber

daya yang tersedia seperti tenaga kerja, biaya, peralatan, partisipasi dan kewenangan yang sah. Pemerintah memegang peran sentral dalam pembangunan masyarakat yaitu dengan menetapkan kebijakan yang bersifat strategis, operasional, dan teknis; (2) pemerintah berperan memberi bimbingan dan bantuan teknis kepada masyarakat dengan maksud agar pada suatu saat masyarakat mampu melakukannya sendiri, misalnya dalam hal perencanaan, awalnya pemerintah melakukan perencanaan untuk masyarakat (*planning for the community*), kemudian perencanaan bersama masyarakat (*planning with the community*), dan akhirnya perencanaan oleh masyarakat (*planning by the community*); dan (3) pemerintah dapat juga melakukan pembinaan terhadap organisasi masyarakat yang dapat berfungsi memudahkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan melakukan hal-hal lain guna meningkatkan keberhasilan pembangunan.

Mengingat hal-hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pola peranan pemerintah bersifat “dari atas ke bawah” (*top-down*). Melalui strategi dari atas ke bawah tersebut dapat dilakukan kontrol yang ketat dan dapat dikeluarkan instruksi secara cepat, serentak, dan seragam. Cara ini kelihatan efisien baik dilihat dari segi waktu maupun energi yang dikeluarkan, lebih-lebih dalam rangka mengejar ketertinggalannya, negara-negara sedang berkembang menempuh segala cara untuk mempercepat pembangunan nasio-

nalnya. Melalui strategi *top-down* seolah-olah pemerintah dapat memaksakan kehendaknya kepada masyarakat. Hal itu dilatarbelakangi oleh sistem nilai dalam masyarakat yang memungkinkan tumbuhnya sikap paternalistik (bapak dan anak buah); bahwa pemerintah yang dianggap paling tahu, berwenang, dan mampu mencapai apa yang terbaik bagi masyarakat.

Sebagai konsekuensinya, memberi kesan bahwa dengan sistem dari atas ke bawah, sikap paternalitis, dan hasrat untuk mempercepat pembangunan, perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat pada umumnya seolah-olah dilakukan secara efisien, akan tetapi dengan hal itu justru kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri tidak bisa tumbuh secara sehat. Dampak yang ditimbulkan berdasarkan posisi dan peranan pemerintah seperti yang digambarkan di atas akan menimbulkan sikap ketergantungan masyarakat kepada pemerintah, sikap apatis dan masa bodoh.

Di samping itu, keberadaan dan peranan organisasi non pemerintah (Ornop) atau *non governmental* (NGO/LSM) yang tersebar di tingkat lokal, nasional, maupun internasional juga diharapkan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat. NGO dalam arti sempit meliputi organisasi nirlaba (*non-profit organization*); lembaga pengembangan swadaya masyarakat (*grassroots organization*); yang kegiatannya berkaitan dengan proses dan dampak pembangunan, pengembangan dan perubahan sosial, serta pemberdayaan rakyat. Menurut

Hagul¹² sekurang-kurangnya ada lima ciri sebagai identitas NGO/LSM diantaranya adalah: (1) menjangkau si paling miskin; (2) partisipasi atau *bottom-up*; (3) tidak birokratis; (4) bisa bereksperimen; dan (5) biaya murah.

Peran NGO dalam memberdayakan rakyat antara lain dapat dirumuskan melalui pendidikan kemandirian dengan berperan sebagai berikut: (1) fasilitator dan katalisator; (2) pelatih dan pendidik; (3) pemupuk modal; dan (4) penyelenggara proyek. Dalam pelaksanaan peran tersebut hubungan antara NGO dengan pemerintah tidak selamanya berjalan mulus, ada kalanya timbul pertentangan karena membela kepentingan yang berbeda. Ada tiga pola hubungan antara NGO dengan pemerintah antara lain: (1) hubungan asosiatif; (2) hubungan paralel; dan (3) konflikatif.

Dalam hubungan yang asosiatif, NGO sering dianggap sebagai kepanjangan tangan pemerintah, karena kerja sama yang sangat erat dengan pemerintah, atau dibentuk untuk kepentingan pelaksanaan program pemerintah. Sedangkan dalam hubungan yang paralel dengan pemerintah, NGO sebagai mitra sejajar bekerja sama dengan pemerintah. Pada hubungan konflikatif terjadi bila NGO mengambil jarak dengan pemerintah karena membela kepentingan kelompok yang berbeda. Sejalan dengan itu, jika ditinjau dari persepsi diri maka NGO dapat

¹² Hagul, Peter. 1992. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.

diklasifikasikan sebagai berikut: (1) NGO sebagai bagian internal dari pemerintah (mitra, kawan atau sekutu pemerintah, bukan seteru/lawan pemerintah); (2) NGO sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat (jembatan/penengah antara pemerintah dengan masyarakat); (3) NGO yang secara tegas menyatakan memihak rakyat dalam berhadapan dengan negara (pendamping rakyat); dan (4) NGO yang melebur dan menyatu dengan rakyat (menyatu dengan organisasi kelompok basis).

Dalam proses memberdayakan masyarakat sekaligus juga memberdayakan organisasi masyarakat (NGO), di Indonesia dilakukan melalui tiga pendekatan¹³ sebagai berikut:

- 1) pendekatan kemanusiaan, walaupun tidak memberdayakan masyarakat sebagai kelompok sasaran, akan tetapi dapat memberdayakan NGO itu sendiri;
- 2) pendekatan pengembangan masyarakat, bertujuan mengembangkan, memandirikan, dan menswadayakan masyarakat; dan
- 3) pendekatan pemberdayaan rakyat, bertujuan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan disegala bidang dan sektor kehidupan.

Sehubungan dengan itu, pemerintah tidak perlu alergi atau curiga terhadap eksistensi berbagai

macam institusi dan aktor di luar institusi pemerintah, bahkan sebaliknya hal itu bisa dimanfaatkan sebagai komponen penguat dalam mencapai tujuan pemberdayaan. Trikotomi peran pemerintah, swasta, masyarakat/LSM untuk menangani masalah-masalah pemberdayaan tidak perlu terjadi, karena peran mereka itu sekarang telah demikian membaur/kabur. Ketiga kekuatan tersebut seyogianya menyatu, mempunyai kepentingan dan komitmen yang sama tingginya dalam mengatasi masalah-masalah pemberdayaan tersebut. Tidak perlu ada sesuatu kekuatan manapun yang dominan melebihi yang lain, semua berinteksi dan berinterelasi serta punya akses yang sama dalam berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

IV. PENUTUP

Dalam kajian dan pelaksanaan pembangunan masyarakat tidak berlaku perspektif tunggal. Masing-masing perspektif dapat menduduki posisi yang dominan pada eranya. Saat ini, pendekatan pemberdayaan masyarakat yang diturunkan dari *people centered development*, sedang berada dipuncak dominasinya. Pendekatan ini menjadi referensi kajian dan pelaksanaan pembangunan masyarakat secara luas. Pada era otonomi daerah, pemerintah daerah seharusnya lebih proaktif dan berinisiatif melakukan penanggulangan kemiskinan dalam perspektif lokal dengan mempertimbangkan kekhususan dan keunikannya masing-masing. Karena masyarakat miskin sebenarnya ada di

¹³ Prijono, Onny S dan Pranarka A.M.W. 1996. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centere for Strategic and International Studies.

tingkat lokal daerah otonom itu sendiri, dan untuk mengatasi kemiskinan tidak bisa hanya menyerahkan saja kepada pemerintah pusat atau propinsi, justru daerah harus selalu mencari cara-cara yang sesuai dengan karakter lokalnya. Penerapan teori ACTORS merupakan realisasi dari cita-cita mengatasi kemiskinan di daerah. Ini merupakan upaya kreatif dan cerdas mengentaskan kemiskinan dengan mempertimbangkan sumberdaya, budaya dan kearifan lokal.

Dengan menggunakan konsep pemberdayaan yang ditawarkan dalam kerangka kerja teori "ACTORS", maka perubahan yang akan dihasilkan merupakan suatu

perubahan yang bersifat terencana karena input yang akan digunakan dalam perubahan telah diantisipasi sejak dini sehingga output yang akan dihasilkan mampu berdayaguna secara optimal. Kajian pengelolaan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan kerangka kerja "ACTORS" akan menumbuhkan kesadaran, rasa percaya diri, semangat, keyakinan, kesempatan, tanggung jawab, dukungan, inisiatif, dan kreativitas, untuk merubah keadaan kearah kemandirian, sehingga memiliki pengetahuan dan pemahaman untuk memberdayakan dirinya (*self-empowering*) secara berkesinambungan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Friedmann, John. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Massachusetts: MT Press.
- Hagul, Peter. 1992. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Hulme, David & Turner M. 1990. *Sociology of Development, Theories, Policies and Practices*. Hartfordshire: Harvester Wheatsheaf.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Kemiskinan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kusnadi. 2006. *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bandung: Humaniora.
- Prijono, Onny S dan Pranarka A.M.W. 1996. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Center for Strategic and International Studies.
- Riyadi, Suprpto. 2001. *Strategy Empowerment*. Malang: FIA Unibraw.
- Safi'i .2011. *Ampih Miskin: Model Kebijakan Penuntasan Kemiskinan dalam Perspektif Teori dan Praktek*. Malang: Averroes Press.
- Sarah Cook & Steve Macaulay. 1997. *Perfect Empewermant*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sen, Amartya. 1984. *Resaurce, Values, and Development*. New York: Wiley.
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkikah Muncul Antitesisnya?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1996. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata.

